RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS KESEHATAN

Jl. Pamenang No. 1-C Telp. (0354) 683756 Fax. 680445

web : dinkes.kedirikab.go.id - email : kesehatan@kedirikab.go.id

K E D I R I

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman Kerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program-program pembangunan kesehatan yang selalu berkelanjutan dan diarahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025.

Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadikan pedoman bagi karyawan-karyawati di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kerjanya. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kurang dari sempurna, kritik dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait dengan perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di tahun yang akan datang. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian Aamiin …

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		……...…….…….	i
Daftar Isi		……..……..…….....	ii
Daftar Tabel		……..…….	iii
BAB	I	Pendahuluan …….….....	1
		1.1. Latar Belakang ……..……....	1
		1.2. Landasan Hukum ……..……	2
		1.3. Maksud dan Tujuan …….	6
		1.4. Sistematika Penulisan ……...	7
BAB	II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu ……..	8
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD	8
		2.2. . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …..	27
		2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……	30
		2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….	38
BAB	III	Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan …….…….……	40
		3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional ……..…….	40
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……..……..	41
		3.3.Program dan Kegiatan ……	41
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	48
BAB	V	PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sampai dengan Tahun Berjalan ……...…	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	25
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kediri……..	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kediri…….	39
Tabel 3.1	Program Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026	42
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 …….	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang siastem perencanaan Pembangunan nasional. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kesehatan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) yaitu merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan awal renja juga mengacu kepada renstra yang telah disusun SKPD pada tahun 2021-2026.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan merupakan terjemahan dari visi, misi dan juga program , yang dituangkan di dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana kerja dan Anggaran tahun 2026.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam renja dapat dijalankan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mengatasi masalah kesehatan nasional, sejalan dengan strategi pemerintahan/ pembangunan mewujudkan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang berkelanjutan yang penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
30. Keputusan Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
37. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai dasar untuk rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi serta untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan;
2. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya;
3. Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat;
5. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang Kesehatan.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

1.1.2. Landasan Hukum

1.1.3. Maksud dan Tujuan

1.1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Pemerintah Daerah

2.1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Pemerintah Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi perangkat daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kediri sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Pada Tahun 2020 semua SKPD mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada tahun 2026 Dinas Kesehatan memiliki menjalankan 5 program 22 kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra SKPD s/d tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program/ kegiatan renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					Urusan Kesehatan									
‘01					**Bidang Urusan Kesehatan**									
‘01	**‘01**	1.02	‘01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**		**78%**	**78%**	**78%**	**100**	**80%**	**158%**	99,5%
		1.02	‘01	201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	**300**	75%

		1.02	‘01	201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2	100
		1.02	‘01	201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)		**15 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**100**	**15 laporan**	**45**	100
		1.02	‘01	202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100
		1.02	‘01	202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN		100	100	100	100	100	400	100
		1.02	‘01	202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)		**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
		1.02	‘01	202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun		**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
		1.02	**‘01**	**205**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100

		1.02	‘01	205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan		0	20	20	100	180	40	10
		1.02	‘01	205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan		80%	80%	80%	100	80%	240	60
		1.02	**‘01**	**206**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**
		1.02	‘01	2060.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)		2	2	2	100	2	6	2
		1.02	‘01	2060.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun		17	17	17	100	10	51	12,75
		1.02	‘01	2060.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)		4	4	4	100	4	12	3
		1.02	‘01	2060.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun		80	80	80	100	90	240	60
		1.02	‘01	2060.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan		7	7	7	100	8	21	5.25

		1.02	‘01	2006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan		2	2	2	100	3	6	3
		1.02	‘01	2006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun		500	500	500	100	600	1500	375
		1.02	‘01	2006	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun		150	150	150	100	200	450	112.5
		1.02	**‘01**	**208**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
		1.02	‘01	2080 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)		12	12	12	12	100	48	12
		1.02	‘01	2080 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)		12	12	12	12	100	48	12
		1.02	‘01	2080 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)		12	12	12	12	100	48	12
		1.02	‘01	2080 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum		12	12	12	12	100	48	12

						kantor dalam 1 tahun (kali)								
		1.02	**'01**	**209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**
		1.02	'01	2090 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	400	100
		1.02	'01	2090 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun		10	10	10	10	100	400	10
		1.02	'01	2090 5	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)		2	2	2	100	2	6	3
		1.02	'01	2090 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)		12	12	12	100	12	36	4

		1.02	‘01	209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)		3	3	3	100	3	9	2.25
		1.02	‘01	209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)		3	3	3	100	3	9	2.25
		1.02	**‘01**	**20.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
		1.02	‘01	20.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD		37 puskesmas	37 puskesmas	37 puskesmas	100	37 puskesmas	37	100
		1.02	**‘02**		**"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"**	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi		12%	49%	41.6%	84.89	49%	36	4
						Indeks Keluarga Sehat		0,14	0,17	0,201	111	0.23		
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat		78,5%	85%	95.1%	101	78,5%		

						Lanjutan (FKTL) terakreditasi								
						Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin		15%	100%	100%	100	17%		
						AKI		83,8	83,8	138.5	165	79,23		
						AKB		7,1	7,1	7.2	101	6,9		
		1.02	**'02**	**201**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	300	75
		1.02	'02	2010.02	Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya		100%	100%	100%	100%	100%	300	75
		1.02	'02	2010.06	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya		16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	100	38,1% (9/35)	50.1	12.52
		1.02	'02	2011.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas		100%	100%	100%	100%	100% (397/397)	300	75
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas		100%	100%	100%	100%	100% (30/30)	300	75

						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas		100%	100%	100%	100%	100% (25/25)	300	75
						Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas		100%	100%	100%	100%	100% (30/30)	300	75
		1.02	‘02	2011.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		75%	77%	77%	100	82%	229	57.25
		1.02	‘02	2011.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi		100 alat	100 alat	100 alat	100	108 alat	300	75
		1.02	‘02	2011.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman		76%	76%	76%	100	85%	228	57
		1.02	‘02	2011.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai		7	7	7	100	7	21	5.25
		1.02	‘02	2012.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik		37 pusk	37 pusk	37 pusk	100	37 pusk	37	100
		1.02	‘02	2012.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun		100%	100%	100%	100%	100%	300	75

					puskesmas serta faskes lainnya									
		1.02	**‘02**	**202**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**		**75%**	**78%**	**78%**	**100**	**85%**	**231**	**57.75**
		1.02	‘02	2020.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)		89%	89%	81.38	91.4%	90%	260	65.75
		1.02	‘02	2020.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart		92%	92%	87.57	95.2%	94%	278	69.5
		1.02	‘02	2020.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)		94%	94%	86.91	92.45	95%	275.91	68.98
		1.02	‘02	2020.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart		77%	77%	77.53	100	80%	234	58.5
		1.02	‘02	2020.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart		55%	55%	77	140	70%	202	50.5
		1.02	‘02	2020.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	100%	39.87	39.87	100%	239	59.9
		1.02	‘02	2020.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart		50%	50%	53.51	107	55%	158.5	39.6

		1.02	‘02	2022.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar		100%	100%	25.96	25.96	100%	225	56.25
		1.02	‘02	2022.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar		100%	100%	92.78	92.78	100%	400	100
		1.02	‘02	2022.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		100%	100%	119.07	119.07	100%	319	79.75
		1.02	‘02	2022.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai		100%	100%	25.38	25.38	100%	325	81.25
		1.02	‘02	2022.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100%	100%	68.82	68.82	100%	368	92
		1.02	‘02	2022.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB		100%	100%	100%	100%	100%	400	100
		1.02	‘02	2022.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A		88%	88%	85%	100%	90%	276	69
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		14,35%	14,35%	14,35%	100	15%	44	40

		1.02	‘02	2021.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk		40 Pos	40 Pos	45	105	45 Pos		
		1.02	‘02	2021.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa ODF		62,30%	62,30%	60	92	70,00%	222	169
		1.02	‘02	2021.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina		6	6	5	90	6	18	
		1.02	‘02	2022.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	400	100
		1.02	‘02	2022.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	2022.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	2022.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan		70%	70%	70%	100	85%	210	70
		1.02	‘02	2022.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA		70%	70%	70%	100	85%	210	70

		1.02	‘02	2022.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	2022.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat		18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100	20	20	
		1.02	‘02	2022.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan		37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
		1.02	‘02	2022.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan lainya		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	2022.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna		3 puskesmas	3 puskesmas	5 puskesmas	100	5 puskesmas	5 puskesmas	100
		1.02	‘02	2022.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	2022.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah			100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	**‘02**	**203**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi**	**Tingkat ketersediaan**		**37 pkm**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**

					Kesehatan secara Terintegrasi	**sistem informasi kesehatan**								
		1.02	‘02	203.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun		38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	100	38 dokumen	38 dokumen	100
		1.02	‘02	203.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM		37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
		1.02	**‘02**	**204**	**"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "**	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
		1.02	‘02	204.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘02	204.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna		3	3	3	100	3	9	100
		1.02	**‘03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**		**70%**	**70%**	**70%**	**100**	**70%**	**210**	**70%**
		1.02	**‘03**	**201**	**Pemberian izin praktek tenaga**	**Jumlah ijin praktik yang**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**

					kesehatan di kabupaten / kota	**diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**								
		1.02	‘03	2010 1	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Faskes tersebut		75%	75%	75%	100	75%		75%
		1.02	‘03	2010 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	**‘03**	**202**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
		1.02	‘03	2020 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	‘03	2020 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standart		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

					Manusia Kesehatan sesuai Standar	ketenagakerjaan minimal di Faskes Pemerintahan								
		1.02	‘03	2002.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	**‘03**	**203**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
		1.02	‘03	203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya		10	10	10	100	10	40	
		1.02	**‘04**		**"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"**	**PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**		**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**
		1.02	**‘04**	**201**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT**	**JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL,**		**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**

						UMOT YANG DITERBITKAN								
		1.02	‘04	2010.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN		20	20	20	100	20	20	100
		1.02	**‘04**	**203**	**"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "**	**JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
		1.02	**‘04**	**203.01**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah		120	120	120	100	120	360	90

					Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya								
		1.02	**'04**	**2066**	**"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "**	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
		1.02	'04	2060.01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	**'05**		**"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren,**		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

						poskesdes, SBH, desa siaga)								
		1.02	**'05**	**201**	**"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "**	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	'05	2011.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
		1.02	**'05**	**202**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**		100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Kediri dengan luas 1.563,42 km2.Secara administratif, Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 Kecamatan, 1 Kelurahan, dan 343 Desa *(Kabupaten Kediri Dalam Angka 2025).* Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 Kabupaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Barat: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang

Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23oC sampai dengan 31oC, dengan ketinggian rata rata 81 meter di atas permukaan laut (Kabupaten Kediri Dalam Angka 2025).

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis di sebelah barat yang bersifat Non Vulkanik, sedangkan tepat dibagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian barat sungai Brantas: merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok dan bagian timur sungai Brantas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan salah satu Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan pembangunan bidang kesehatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan
d. Pengkoordinasian bidang kesehatan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dan kondisi geografis yang luas maka akan menimbulkan tantangan dan peluang yahg harus dapat disikapi sebagai leading sktor dalam Pembangunan Kesehatan.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	95%	96,91%	102,01%	Sangat Baik
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	100%	100%	100%	Baik

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capain indicator kinerja Dinas Kesehatan sudah memiliki capaian sangat baik dan baik, sedangkan capaian anggaran organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2024 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	134.327.391.800	131.028.459.377	97,54%	Zona Hijau
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama	52.360.283.080	44.119.218.686	84,26%	Zona Hijau

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk melaksanakan indicator kinerja dan sasaran perlu adanya dukungan anggaran, dukungan anggaran dan realisasi tahun 2024 disajikan dalam table berikut :

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**144.017.434.193**	**140.752.891.716**	**97,7%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	130.324.700	115.734.000	88,8%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	39.900.000	33.190.000	83,2%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun	90.424.700	82.544.000	91,3%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**141.658.048.413**	**138.668.665.930**	**97,9%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	139.242.572.649	136.493.847.806	98,0%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	1.164.857.764	1.118.323.599	96,0%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	1.011.530.000	923.262.858	91,3%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Keuangan SKPD				
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun dalam 1 tahun	230.648.000	124.811.667	54,1%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun dalam 1 tahun	8.440.000	8.420.000	99,8%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase sarana penunjang pegawai yang tersedia***	**55.954.000**	**51.074.000**	**91,3%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan/ dibeli	55.954.000	51.074.000	91,3%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**367.316.800**	**281.302.520**	**76,6%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	92.496.600	79.374.194	85,8%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	43.467.200	27.557.792	63,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	162.827.800	133.847.234	82,2%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	59.990.200	38.007.800	63,4%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	8.535.000	2.515.500	29,5%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.193.646.380**	**1.080.122.603**	**90,5%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	1.500.000	153.000	10,2%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	521.624.380	436.993.626	83,8%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	80.000.000	66.728.500	83,4%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	590.522.000	576.247.477	97,6%
Pemeliharaan Barang	***Cakupan pelaksanaan***	**612.143.900**	**555.992.663**	**90,8%**

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Seluruh kendaraan operasional terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	20.000.000	12.722.400	63,6%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Seluruh kendaraan operasional mendapatkan pemeliharaan dan siap dipakai dalam 1 tahun	214.433.700	174.460.180	81,4%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Seluruh alat kantor yang tidak dalam kondisi rusak berat berada dalam kondisi baik dan siap dipakai dalam 1 tahun (kali)	177.710.200	175.149.260	98,6%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	200.000.000	193.660.823	96,8%
Peningkatan Pelayanan BLUD	***Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD***	**121.417.706.764**	**99.800.464.336**	**82,2%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan BOK Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD dan BOK	121.417.706.764	99.800.464.336	82,2%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Kecamatan STBM**	**149.803.005.370**	**145.459.433.613**	**97,1%**
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			
	Indeks Keluarga Sehat			
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi			
	Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
	AKI			
	AKB			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**31.751.215.595**	**25.303.236.871**	**79,7%**
Pembangunan	Jumlah Puskesmas Yang	17.475.651.206	11.854.387.026	67,8%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
puskesmas	Dibangun			
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	4.796.591.773	4.511.076.838	94,0%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	206.985.762	186.432.302	90,1%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	2.184.450.000	2.064.306.280	94,5%
Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai/BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	6.411.417.854	6.169.697.577	96,2%
	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang terpelihara sesuai standar	336.519.000	330.788.829	98,3%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan	339.600.000	186.548.019	54,9%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**	149.803.005.370	145.459.433.613	97,1%
	Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama			
	Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina			
	Persentase penyehat tradisional yang dibina			
	Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			
	Persentase akses sanitasi layak			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	165.620.000	161.946.900	97,8%
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	126.739.900	68.780.800	54,3%
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	469.983.540	291.463.000	62,0%
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	149.961.000	139.723.800	93,2%
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	162.189.000	157.543.800	97,1%
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	162.873.400	161.472.280	99,1%
	Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu			
	Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR			
	Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	92.273.800	87.969.800	95,3%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	138.795.000	136.600.429	98,4%
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	2.103.058.500	2.042.935.200	97,1%
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	291.089.700	280.521.750	96,4%
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.429.952.000	1.407.448.500	98,4%
	Persentase penemuan dan penanganan kasus TB			
	Persentase keberhasilan pengobatan TB			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	544.701.500	530.735.355	97,4%
	Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	11.940.000	7.709.000	64,6%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	13.044.000	11.864.000	91,0%
Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	2.502.031.800	2.399.309.129	95,9%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita			
	Prevalensi anemia pada ibu hamil			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	64.999.800	64.624.800	99,4%
	Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya			
	Persentase Tempat Kerja Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga			
	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			
	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Melaksanakan Aktifitas Fisik			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	1.369.505.000	1.361.682.179	99,4%
	Persentase desa ODF			
	Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya			
	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis			
	Persentase Tempat-tempat			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Pengelolaan Pelayanan Promsosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	300.879.560	241.749.950	80,3%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tardisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	103.282.700	103.282.700	99,5%
	Jumlah penyehat tradisional yang dibina			
	Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA			
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	180.504.250	172.373.999	95,5%
	Penemuan kasus Non AFP			
	Penemuan kasus suspect campak			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	42.408.000	27.358.000	64,5%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.055.028.200	3.709.616.426	91,5%
	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart			
	Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart			
	Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart			
	Persentase Penemuan Kusta Pada Anak			
	Persentase Cacat Pada Kasus Kusta Baru			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Persentase Penderita Kusta RFT-MB			
	Persentase Penderita Kusta RDT-PB			
	Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP			
	Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)			
	Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart			
	Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart			
	Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B			
	Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam			
	Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif			
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart			
	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)			
	Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	134.327.391.800	131.028.459.377	97,5%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	104.274.500	75.694.436	72,6%
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	50.000.000	49.635.000	99,3%
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.524.000	9.373.000	56,7%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	106.170.000	99.519.800	93,7%
	Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	74.202.000	68.052.000	91,7%
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	381.260.000	351.160.728	92,1%
Pengelolaan Pelayanan Malaria	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan malaria	2.412.800	2.269.996	94,1%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	259.909.620	209.110.200	80,5%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan***	**370.626.615**	**329.078.544**	**88,8%**
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	370.626.615	329.078.544	88,8%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi			

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Kesehatan			
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan***	667.268.800	485.572.321	72,8%
	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)			
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS			
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi			
	Persentase RS yang terakreditasi paripurna			
	Persentase Klinik Utama yang terakreditasi			
	Persentase lab Madya yang terakreditasi			
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	607.399.800	433.474.631	71,4%
	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS			
	Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi			
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	59.869.000	52.097.690	87,0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**2.194.316.400**	**2.000.874.864**	**91,2%**
Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**7.274.800**	**5.320.000**	**73,1%**
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK di Faskes pemerintahan	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	7.274.800	5.320.000	73,1%
Perencanaan	**Tersedianya perencanaan**	**201.740.100**	**159.758.180**	**79,2%**

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**			
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	9.799.600	5.004.000	51,1%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	191.940.500	154.754.180	80,6%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase ASN Yang Dikembangkan Kompetensinya***	1.985.301.500	1.835.796.684	92,5%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	1.985.100.500	2.166.196.950	109,1%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT** **Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat**	656.119.000	523.897.821	79,8%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	**Jumlah rekomendasi Apotek, TO, Tk Alkes dan Optikal UMOT yang diterbitkan** **Persentase Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, UMOT yang dibina dan diawasi**	65.930.000	55.755.000	84,6%
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi Apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang memenuhi persyaratan Jumlah apotek, TO, toko alkes, dan optikal , UMOT yang dibina dan diawasi	65.930.000	55.755.000	84,6%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan**	241.600.000	191.463.304	79,2%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	241.600.000	191.463.304	79,2%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	**Presentase TPM yang ber SLHS**	**85.000.000**	**69.884.000**	**82,2%**
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum yang diterbitkan	85.000.000	77.724.000	91,4%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		**55.000.000**	**37.178.750**	**67,6%**
Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut penerbitan Stiker pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan	Jumlah stikerisasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	55.000.000	37.178.750	67,6%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga**	**208.589.000**	**169.616.767**	**81,3%**
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	208.589.000	169.616.767	81,3%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	**1.245.123.100**	**1.045.584.029**	**84,0%**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	**Frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	**1.142.117.200**	**958.306.029**	**83,9%**

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	1.142.117.200	958.306.029	83,9%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	**65.000.000**	**57.254.000**	**88,1%**
Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	65.000.000	57.254.000	88,1%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa**	**38.005.900**	**30.024.000**	**79,0%**
	Cakupan promosi kesehatan tingkat desa			
	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina			
	Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)			
	Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)			
	persentase poskestren purnama mandiri (PURI)			
	persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)			
	persentase desa-kelurahan siaga aktif			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	38.005.900	30.024.000	79,%

Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan capaian SPM, Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di dalam peraturan tersebut ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus;

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten.Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas kesehatan Kabupaten Kediri diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Kediri, terdapat 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur pencapaiannya dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Berikut akan disampaikan gambaran pencapaian Indikator Kinerja baik IKK maupun SPM**.**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

No.	Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun				tahun		tahun		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
1	Angka Kematian Ibu	-	56.58	60,63	56,58	56,58	56,58	57		61	61	
2	Angka Kematian Bayi	-	7.00	7,3	7	7	7	6.4		6	6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.75%	85	85	85	85	81.21	84.23	84.62	84.62	
4	Persentase Keluarga Sehat	-		100%	100%	100%	100%	100	100			
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		94	95	95	95	76,92	90.61	92.89	92.89	
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		96	97	97	97	78,70	91.37	94.38	94.38	
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		98	99	99	99	80,94	98.31	96.52	96.52	
8	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		84	86	86	86	78,98	97.40	84.90	84.90	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	83,29	94.92	95.82	95.82	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	42,41	92.05	28.33	28.33	

11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		67%	68%	68%	68%	67,68	87.89	69.71	69.71	
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100 %	100%	25.96	93.2	19.29	19.29	
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%		100%	100%	100 %	100%	92.78	93.6	29.40	29.40	
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%		100%	100%	100%	100%	119.07	100	100	100	
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	100%		45%	50%	55%	60%	25.38	100	100	100	
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		60%	65%	70%	75%	68.82	109	87.76	87.76	

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu pada empat indikator pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas), Angka/Umur Harapan Hidup, Status Gizi Masyarakat.

A. Mortalitas (Angka Kematian)

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka Kematian yang terkait adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita serta Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan bencana alam.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup, dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Berdasarkan laporan Puskesmas jumlah kematian ibu maternal di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus dari 20.047 kelahiran hidup atau 68,5 per 100.000 KH. Kematian Ibu mengalami peningkatan dari tahun 2022, dimana jumlah kematian ibu di tahun 2022 sebanyak 15 kasus, dengan Angka Kematian Ibu (AKI) 67,25 per 100.000 kelahiran hidup.

Dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan dari 10 menjadi 11 ibu. Kematian ibu di tahun 2024 ini tersebar di beberapa wilayah Puskesmas di Kabupaten Kediri. Persebaran kasus kematian ibu pada tahun 2024 ada di beberapa puskesmas, kantong terbesar di wilayah Puskesmas Grogol Kecamatan Grogol sebanya 4 ibu, disusul dengan wilayah Puskesmas Badas 2 ibu, dan disusul wilayah Puskesmas Puncu, Sambi, Blabak Kec Kandat, Semen, dan Kayen Kidul masing- masing sebanyak 1 ibu. 60 % kematian ibu didominasi Resiko Tinggi dengan 4 Terlalu yaitu Usia ibu lebih dari 35 tahun, sisanya penyebab kematian ibu tertinggi adalah Perdarahan (55%). Penyebab kematian ibu lainnya pada tahun ini adalah Pre Eklamsia (27%),Gangguan Hipertensi (9%), dan penyebab Lain-lain (9%). Kondisi ibu sebelum hamil, seperti penyakit yang pernah diderita ibu menjadi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan ibu mengalami komplikasi saat hamil. Dari sejumlah 11 kasus kematian ibu pada tahun 2024, ibu meninggal paling banyak terjadi saat masa nifas yaitu 5 kasus, saat persalinan 4 kasus dan ibu yang meninggal saat hamil sebanyak 2 kasus.

Dari data Kematian Ibu di Kabupaten Kediri Tahun 2024, 90% sudah ditolong oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit, namun perlu diperhatikan perdasarkan analisis rata-rata ibu meninggal belum terpapar oleh kelas ibu hamil sehingga kurang dalam memahami tanda bahaya kehamilan. usia produktif.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin

kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Selain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) juga termasuk dalam indicator SDGs. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal dalam rentang usia 0 – 11 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah balita yang meninggal dalam rentang usia 0 – 59 bulan per 1000 kelahiran hidup. AKB dari tahun 2011 hingga 2024 selalu menurun, namun di tahun 2024 ini mengalami kenaikan mencapai angka 6,8 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKB hal ini disebabkan karena angka kelahiran yang terus menurun. Bila dilihat secara absolut angka kematian menurun yaitu sebanyak 61 kasus.

Kematian Bayi terbanyak disebabkan oleh Asfiksia sebanyak 21 kasus, BBLR dan Prematuritas 10 kasus, Infeksi 7 kasus, cardiovaskuler 4 dan lain-lain sebanyak 3 kasus.

Kematian Post Neonatal atau bayi berusia 29 hari – 11 bulan lebih sedikit kasusnya dibandingkan dengan kasus kematian neonatal. Pada masa post neonatal ini 80% kasus kematiaan karena penyebab lain-lain yang beragam. Kondisi perinatal, pneumonia dan kelainan kongenital masing-masing sebanyak diare sebanyak 3 menjadi penyebab kematian masa post neonatal ini. Selain itu ada diare dan demam berdarah masing- masing 1 kasus (4%).

Kematian Balita usia 0 – 59 bulan tahun 2023 sebanyak 63 kasus, dengan pada masa anak balita 12 – 29 bulan, 1 kasus dengan penyebab pneumonia.

B. Morbiditas (Angka Kesakitan)

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu morbiditas juga berperan dalan

penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare.

C. Angka/Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Kediri adalah sebesar 48%. Rasio ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15–64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Indikator Indeks Kesehatan direpresentasikan dengan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merupakan salah satu komponen dalam penghitungan IPM dalam dimensi kesehatan dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 2024 mencapai 75,07 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,85 tahun. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur semakin baiknya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri melalui berbagai inovasi dan perbaikan layanan kesehataan serta keterjangkauan kesehatan bagi masyarakat. (Sumber: Profil Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025).

D. Status Gizi Masyarakat

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mengetahui status gizi balita adalah dengan menggunakan metode antropometri. Dalam metode antropometri, indeks yang umum dipakai adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang kemudian dikategorikan dalam Berat Badan Lebih (Z score> +2 SD), Berat Badan Normal (Z score -2 SD sampai +2 SD), Berat Badan Kurang (Z score < -2 SD sampai -3 SD) dan Berat Badan Sangat Kurang (Z score < - 3 SD).

Berdasarkan data, jumlah balita yang ditimbang pada Tahun 2021 yaitu 88.95 balita. Sedangkan distribusi status gizi balita,sebanyak 95,0 % balita yang ditimbang mempunyai berat badan normal, 3,4 % balita mempunyai berat badan kurang, 0,6 % balita mempunyai berat badan sangat kurang dan 1,0 % balita mempunyai berat badan lebih.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
2) Pelayanan kesehatan balita sakit

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

Adapun untuk menggambarkan keberhasilan program penimbangan di Posyandu di wilayah Kabupaten Kediri, salah satu ukuran yang digunakan adalah dari kenaikan berat badan balita. Sehingga ibu balita berusaha untuk memberi asupan yang seimbang agar pada bulan penimbangan berikutnya berat badan balitanya meningkat secara signifikan.

Upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi :

1. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita, serta kepada ibu nifas.

   Strategi penanggulangan Kurang Vitamin A dilaksanakan melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu kapsul vitamin A biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Agustus, dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita (1-5 tahun) sebanyak dua kali setahun yaitu tiap bulan Februari dan Agustus.

   Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, cakupan pemberian kapsul vitamin A selama empat tahun terakhir sudah mengalami pencapaian sebanyak 90%.

   Hasil pencapaian tersebut dipengaruhi oleh jumlah sasaran berdasarkan perkiraan penduduk, keaktifan petugas mendistribusikan kapsul vitamin A dan ibu balita yang menyadari akan pentingnya kapsul vitamin A bagi balitanya.

2. ASI eksklusif

   Pemberian ASI sangat perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun. ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Pemantauan Pemberian ASI Ekslusif dilaksanakan melalui sistem pelaporan elektronik berbasis website yaitu ePPGBM.

Berdasarkan hasil laporan puskesmas tahun 2023, pemberian ASI Eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan sejumlah 10.418 bayi atau 81,3%. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Kabupaten Kediri telah mencapai target Renstra Kabupaten Kediri (80,0%). Sedangkan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan IMD sebanyak 11.693 (77,2%) dari 16.070 bayi yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen petugas kesehatan untuk membantu ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui, ada peningkatan pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui dan cara menyusui yang tepat, dukungan dari keluarga, serta dengan adanya sosialisasi terkait Peraturan WaliKabupaten Kediri (Perwal) No. 7 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Kediri.

Namun demikian pencapaian dalam program ASI Eksklusif ini harus mendapatkan perhatian khusus dan memerlukan pemikiran dalam mencari upaya-upaya terobosan serta tindakan nyata yang harus dilakukan oleh provider di bidang kesehatan dan semua komponen masyarakat dalam rangka penyampaian informasi maupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2023 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Kesehatan dan juga tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan. Review terhadap RKPD meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri berupa RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan

Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

TABEL 2.3

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Kediri

	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "**	Dinkes	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**167.751.154.218,00**	**"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota "**	Dinkes	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	12 Bulan	**167.699.539.618**	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	312.053.200,00	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	312.053.200	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	164.391.482.846,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	164.346.450.846	

	5. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	60.900.000,00					60.900.000	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	450.789.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	444.206.800	
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.435.878.300,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.435.878.300	
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.100.050.472,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.100.050.472	
	"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"	**Dinkes**	Persentase Kecamatan STBM	**100%**	**226.685.829.015,00**	**"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"**	**Dinkes**	Persentase Kecamatan STBM	**100%**	**195.937.302.386**	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi			

			Indeks Keluarga Sehat					Indeks Keluarga Sehat			
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi			
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin					Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin			
			AKI					AKI			
			AKB					AKB			
	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	27.844.711.686,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	28.786.766.686,00	
	2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	198.082.648.329,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	100%	166.392.066.700,00	
	3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	341.200.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	341.200.000,00	

	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	417.269.000,00	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Dinkes	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	417.269.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Dinkes**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100%**	**2.040.981.200,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Dinkes**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100%**	**2.040.981.200,00**	
	1 Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	59.294.800,00	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Dinkes	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	59.294.800,00	
	2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah	100%	140.416.400,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah	100%	130.616.800,00	
	3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	1.841.270.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Dinkes	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	1.841.270.000,00	

	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"	**Dinkes**	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot**	100%	**723.157.000,00**	**"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"**	**Dinkes**	**Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Akles Dan Optikal, Umot**	100%	**723.157.000,00**	
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Dinkes	Jumlah rekomendasi apotek, to, tk. Akles dan optikal, umot yang diterbitkan	100%	193.403.000,00	
2	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%		"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%	115.930.800,00	

	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM)	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%	85.000.000,00					85.000.000,00	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes	Jumlah sertifikat p-irt yang diterbitkan	100%	55.000.000,00					55.000.000,00	
3	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%	583.157.000,00	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "	Dinkes	Prosentase pemeriksaan produksi makanan minuman industri rumah tangga	100%	273.823.200,00	
	"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	**Dinkes**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	**65,03%**	**1.139.938.502,00**	**"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"**	**Dinkes**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	**65,03 %**	**505.302.152,00**	
1	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dinkes	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	897.402.502,00	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	Dinkes	frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	350.000.000,00	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "					dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "					
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	65.000.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	65.000.000,00	
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	177.536.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	90.302.152,00	
	TOTAL				***340.070.088.042,00***					***366.906.282.356,00***	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kediri demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, maupun dari SKPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD baik dari segi penjelasan kesehatan maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan bersumber masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 Kabupaten Kediri tersaji dalam table berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa Tempurejo Kec Kandangan	Pelatihan Kader Kesehatan	30 orang kader	
		Desa Banjarejo Kec. Kandangan	Pelatihan Kader Kesehatan	30 orang kader	
	Pengmbangan Puskesmas	Desa Kemiri Kec. Kandangan	Pembangunan Pustu	Pembangunan Pustu	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.Dalam menyusun Program dan Kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kesehatan yaitu terhadap Pembentukan Lingkungan Sehat dan Pembentukan Perilaku Hidup Sehat. Untuk terselenggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesehatan Masyarakat
b. Meningkatnya pengendalian penyakit
c. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
d. Meningkatnya jumlah, jenis kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
e. Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
f. Meningkatnya sinergitas antar kementrian / lembaga pusat dan daerah
g. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
h. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimtek dan monev
i. Meningkatnya efetifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
j. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
k. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kemetrian kesehatan
l. Meiningkatnya system informasi kesehatan terintegrasi

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2021-2026 yang terjuang dalam renstra kementerian kesehatan tahun 2021-2026, adalah “meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan dasar *(primary health care)* dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi”

Adapun strategi RPJMN 2021-2026 bidang kesehatan :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat
5. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk menyamakan persepsi seluruh aparat perencana yang ada di Dinas Kesehatan, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam meyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan kabupaten Kediri salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah ” Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat”. Dengan Indikator tujuan adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator sasaran**	**Target tahunan**					
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Presentase masyarakat yeng memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	59 % (21 Puskesmas paripurna 3 utama 18) RS paripurna	62 % (22 Puskesmas paripurna 3 utama 19) RS paripurna	63 % (23 Puskesmas paripurna 3 utama 20) RS	72 % (26 Puskesmas paripurna 4 utama 22) RS	80 % (29 Puskesmas paripurna 5 utama 24) RS	87 % (39 Puskesmas paripurna 6 utama 26) RS

	minimal utama	1; RS Utama 1	1; RS Utama 1	paripurna 2;	paripurna 2;	paripurna 2;	paripurna 2;

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian SDGs. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan pada tahun 2025 sebanyak 5 program dan 17 kegiatan, untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Program Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota "	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan puskesmas
		Pengembangan Puskesmas
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial

		KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

	dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"
"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"	"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat "
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

TABEL 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kediri

Kode	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu definitive tahun 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	**Urusan : Layanan Dasar**								
	2. Persentase Keluarga Sehat	**Bidang : Kesehatan**								
1.02.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**			100%	**167.699.539.618,00**	**DAU**		100%	**161.725.948.415,00**
1.02.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun**	**Dinkes**	**4 Dokumen**	**312.053.200,00**				**195.007.500,00**
1.02.01.2.01.01		1. Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Dokumen Perencanaan yang disusun	Dinkes	4 Dokumen	187.230.000,00	APBD	Baru	6 Dokumen	40.727.000,00
1.02.01.2.01.06		2. Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja	Dokumen laporan pencapaian kinerja keuangan dan realisasi	Dinkes	12 Bulan	124.823.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	154.280.500,00

			danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	kinerja SKPD yang disusun							
1.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**164.346.450.846,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**86.780.194.733,00**
1.02.01.2.02.01		1.	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	161.964.233.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	83.512.042.883,00
1.02.01.2.02.02		2.	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksana Tugas ASN selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1.127.749.846,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.605.313.850,00
1.02.01.2.02.03		3.	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Tersedianya anggaran untuk verifikasi keuangan SKPD selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	1.189.500.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.522.570.000,00
1.02.01.2.02.05		4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersdianya anggaran untuk penyusunalan laporan keuangan akhir tahun	Dinkes	12 bulan	64.968.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	9.328.000,00
1.02.01.2.02.07		5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersdianya anggaran untuk penyusunalan laporan keuangan bulanan	Dinkes	12 bulan	60.900.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	130.940.000,00
1.02.01.2.05		**Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah**				**12 Bulan**	**60.900.000,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**150000000**
1.02.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya (batik 40 jt)	Tersedianya anggaran untuk seragam Dinkes	Dinkes	12 Bulan	60.900.000,00				150.000.000
1.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Selama 1 tahun**	**Dinkes**	**12 bulan**	**444.206.800,00**	**APBD**	**Baru**	**12 bulan**	**1.262.739.900,00**
1.02.01.2.06.01		1.	Penyediaan KomponenInstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik selama 1 tahun	Dinkes	12 bulan	44.498.800,00	APBD	Baru	12 bulan	130.692.400,00

1.02.01.2.06.02		2.	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Teresdianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	69.970.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	750.359.600,00
1.02.01.2.06.03		3.	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Teresedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	39.505.400,00	APBD	Baru	12 Bulan	53.233.400,00
1.02.01.2.06.04		4.	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Teresedianya Bahan Logistik Kantor	Dinkes	12 bulan	162.827.400,00	APBD	Baru	12 Bulan	215.515.800,00
1.02.01.2.06.05		5.	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinkes	12 bulan	59.990.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	76.000.000,00
1.02.01.2.06.06		6.	Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Teresedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang – undangan	Dinkes	12 bulan	67.415.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	3.836.200,00
1.02.01.2.06.08		7.	Fasilitasi KunjunganTamu	Tersedianya Persediaan kunjungan tamu	Dinkes	12 bulan	67.415.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	33.102.500,00
1.02.01.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Teresedianya Jasa penunjang ursan pemerintah daerah**	**Dinkes**	**12 bulan**	**1.435.878.300,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**1.135.998.000,00**
1 02 01 2.08 01		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedaiaan jasa surat menyurat	Dinkes	12 Bulan	2.500.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.560.000,00
1.02.01.01.2.08.02		2.	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinkes	12 bulan	578.745.300,00	APBD	Baru	12 Bulan	459.476.000,00
1.02.01.01.2.08.03		3.	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatam dan perlengkapan kantor	Dinkes	12 bulan	120.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	96.000.000,00
1.02.01.01.2.08.04		4.	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum dan kantor	Dinkes	12 bulan	734.633.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	578.962.000,00
1.02.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**		**Tersedianya biaya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**1.100.050.472,00**	**APBD**	**Baru**	**12 Bulan**	**630.449.092,50**
1.02.01.2.09.01		1.	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan	Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan	Dinkes	12 Bulan	24.800.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	25.000.000,00

			PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan							
1.02.01.2.09.02		2.	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Tersedianya JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Dinkes	12 Bulan	628.723.700,00	APBD	Baru	12 Bulan	304.527.000,00
1.02.01.2.09.05		3.	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya pemeliharaan mebel dalam satu tahun	Dinkes	12 Bulan	10.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	25.000.000,00
1.02.01.2.09.06		4.	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Dalam atu tahun	Dinkes	12 Bulan	154.710.200,00	APBD	Baru	12 Bulan	148.900.000,00
1.02.01.2.09.06		5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainya	Dinkes	12 Bulan	281.816.572,00	APBD	Baru	12 Bulan	50.751.600,00
1.02.01.2.09.10		6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Dinkes	12 Bulan	0	APBD	Baru	12 Bulan	76.270.492,50
1.02.02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**			**195.937.302.386,00**				**83.781.008.719,00**
1.02.02.2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot**		**Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**Dinkes**	**12 Bulan**	**28.786.766.686,00**		**Baru**	**12 Bulan**	**32.149.948.000,00**

1 02 02 2.01 02			Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	12.600.420.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	19.600.000.000,00
1 02 02 2.01 06			Pengembangan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	1.355.318.262,00	APBD	Baru	12 Bulan	7.500.000.000,00
1 02 02 2.01 09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 Bulan	1.450.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.650.000.000,00
1 02 02 2.01 10			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinkes	12 Bulan	69.999.700,00	APBD	baru	12 Bulan	100.000.000
1.02.02.2.14		3.	Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Tersedianya Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Dinkes	12 Bulan	486.489.124,00	DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum DBH CHT	Baru	12 Bulan	1.163.000.000,00
1.02.02.2.16		4.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya pengadaan obat, vaksin	Dinkes	12 Bulan	12.287.133.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	1.560.720.000,00

1.02.02.2.20		6.	Pemeliharaan Rutin danBerkala AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Pemeliharaan Rutin danBerkala AlatKesehatan/AlatPenunjang MedikFasilitas PelayananKesehatan	Dinkes	12 Bulan	287.406.600,00	APBD	Baru	12 Bulan	472.640.000,00
1 02 02 2.01 21			Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	Dinkes	12 Bulan	250.000.000,00	APBD	Baru	12 Bulan	223.495.000,00
1.02.02.2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**166.392.066.700,00**				**49.899.973.043,00**
1.02.02.2.02.01		1.	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Dinkes	100%	165.620.000,00	APBD	Baru	100%	324.950.000,00
1.02.02.2.02.02		2.	Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Cakupan PelayananKesehatan Ibu Bersalin	Dinkes	100%	126.740.000,00	APBD	Baru	100%	245.500.000,00
1.02.02.2.02.03		3.	Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	100%	97.500.000,00	APBD	Baru	100%	253.400.000,00
1.02.02.2.02.04		4.	Pengelolaan PelayananKesehatan Balita	Cakupan PelayananKesehatan Balita	Dinkes	100%	149.961.000,00	APBD	Baru	100%	878.900.000,00
1.02.02.2.02.05		5.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	Dinkes	100%	162.189.000,00	APBD	Baru	100%	200.175.000,00
1.02.02.2.02.06		6.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif	Dinkes	100%	300.977.400,00	APBD	Baru	100%	161.677.500,00
1.02.02.2.02.07		7.	Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaLanjut	Cakupan PelayananKesehatan pada UsiaLanjut	Dinkes	100%	104.753.800,00	APBD	Baru	100%	89.540.000,00

1.02.02.2.02.08		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Dinkes	100%	138.795.000,00	APBD	Baru	100%	187.288.000,00
1.02.02.2.02.09		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	Dinkes	100%	84.943.500,00	APBD	Baru	100%	1.605.648.500,00
1.02.02.2.02.10		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinkes	100%	291.089.700,00	APBD	Baru	100%	
1.02.02.2.02.11		11	Pengelolaan PelayananKesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	Cakupan PelayananKesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	Dinkes	100%	310.347.000,00	APBD	Baru	100%	2.129.540.000,00
1.02.02.2.02.12		12	Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Cakupan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Dinkes	100%	173.647.800,00	APBD	Baru	100%	153.425.000,00
1.02.02.2.02.13		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	Dinkes	100%	75.000.000,00	APBD	Baru	100%	529.860.257,00
1 02 02 2.02 14		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Dinkes	100%	62.670.000,00	APBD	Baru	100%	40.384.200,00
1.02.02.2.02.15		15	Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat	Cakupan PelayananKesehatan GiziMasyarakat	Dinkes	100%	491.343.000,00	APBD	Baru	100%	1.274.083.000,00
1.02.02.2.02.16		16	Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga	Cakupan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga	Dinkes	100%	181.562.000,00	APBD	Baru	100%	110.488.800,00
1.02.02.2.02.17		17.	Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan	Cakupan PelayananKesehatan Lingkungan	Dinkes	100%	147.475.700,00	APBD	Baru	100%	795.639.900,00
		18.	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Cakupan Pelayanan promosi Kesehatan	Dinkes	100%	622.091.000,00				

1.02.02.2.02.19		19.	Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya	Cakupan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya	Dinkes	100%	103.282.800,00	APBD	Baru	100%	119.838.900,00
1.02.02.2.02.20		20.	Pengelolaan SurveilansKesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	Dinkes	100%	239.066.500,00	APBD	Baru	100%	234.309.286,00
1.02.02.2.02.22		22.	Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa danNAPZA	Cakupan PelayananKesehatan Jiwa danNAPZA	Dinkes	100%	375.974.000,00	APBD	Baru	100%	223.405.500,00
1.02.02.2.02.25		25.	Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular	Cakupan Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular	Dinkes	100%	160.446.289.500,00	APBD	Baru	100%	1.916.117.000,00
1.02.02.2.02.26		26.	Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Dinkes	100%	85.757.500,00	APBD	Baru	100%	35.583.347.200,00
1.02.02.2.02.28		28.	Pengambilan danPengiriman SpesimenPenyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional	Presentase Pengambilan danPengiriman SpesimenPenyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional	Dinkes	100%	50.000.000,00	APBD	Baru	100%	14.768.000,00
1.02.02.2.02.29		29.	PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat	Presentase kabupaten sehat	Dinkes	100%		APBD	Baru	100%	379.174.000,00
1.02.02.2.02.34		34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Kesehatan lainya	Dinkes	100%	585.171.500,00				
1.02.02.2.02.36		36	Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal)	Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal)	Dinkes	100%	100.380.000,00	APBD	Baru	100%	272.182.400,00
1 02 02 2.02 37			Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dan respon wabah	Dinkes	100%	75.000.000,00	APBD	Baru	100%	30.264.000,00
1 02 02 2.02 38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	Dinkes	100%	464.760.000,00	APBD	Baru	100%	461.725.500,00

			Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
1 02 02 2.02 42			Pelayanan kesehatan Malaria	Pelayanan kesehatan Malaria	Dinkes	100%	23.037.000,00				15.285.000,00
1 02 02 2.02 46			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes	100%	156.642.000,00				
1.02.02.2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi**					**341.200.000,00**				**498.847.676,00**
1.02.02.2.03.01		1.	Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan	Jumlah pengelola data dan informasi kesehatan	Dinkes	100%	341.200.000,00	APBD	Baru	100%	415.617.676,00
1.02.02.2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**417.269.000,00**				**1.232.240.000,00**
1.02.02.2.04.03		1.	Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan	Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan	Dinkes	100%	357.400.000,00	APBD	Baru	100%	1.157.365.000,00
1.02.02.2.04.04		2.	Penyiapan Perumusandan PelaksanaanPelayanan KesehatanRujukan	Penyiapan Perumusandan PelaksanaanPelayanan KesehatanRujukan	Dinkes	100%	59.869.000,00	APBD	Baru	100%	74.875.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	Dinkes	70%	**2.040.981.200,00**	APBD	Baru	100%	**2.977.790.151,00**
		Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota		Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	Dinkes	100%	**59.294.800,00**	APBD	Baru	100%	**24.779.500,00**
		2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	Dinkes	100%	59.294.800,00	APBD	Baru	100%	14.475.000,00

		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**Dinkes**	**100%**	**140.416.400,00**	APBD	Baru	100%	**141.118.800,00**
		1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	9.799.600,00	APBD	Baru	100%	9.799.800,00
		3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	Dinkes	100%	130.616.800,00	APBD	Baru	100%	131.319.000,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya**	**Dinkes**	**100%**	**1.841.270.000,00**	APBD	Baru	100%	**2.811.891.851,00**
		1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	**Dinkes**	**100%**	1.841.270.000,00	APBD	Baru	100%	2.811.891.851,00
1.02.04		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN**					**723.157.000,00**				**1.219.613.600,00**
1.02.04.2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga**					**193.403.000,00**				**383.423.000,00**

1.02.04.2.03.01			Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat ProduksiPangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRTsebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangdapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga	Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat ProduksiPangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRTsebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangdapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga	Dinkes	100%	193.403.000,00	APBD	Baru	100%	383.423.000,00
1 02 04 2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			Dinkes	100%	**115.930.800,00**				**103.586.800,00**
1 02 04 2.04 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Dinkes	100%	115.930.800,00	APBD	Baru	100%	103.586.800,00
1 02 04 2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**85.000.000,00**				**60.387.800,00**
1 02 04 2.05 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Dinkes	100%	85.000.000,00	APBD	Baru	100%	60.387.800,00

1.02.04.2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan MinumanIndustri Rumah Tangga**	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	Dinkes	100%	**55.000.000,00**	APBD	Baru	100%	**393.523.000,00**
1.02.04.2.06.01		1. Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Dinkes	100%	55.000.000,00	APBD	Baru	100%	393.523.000,00
1.02.05		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGKESEHATAN**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	Dinkes	100%	**505.302.152,00**	APBD	Baru	100%	**2.482.516.706,00**
1.02.05.2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	Dinkes	100%	**350.000.000,00**	APBD	Baru	100%	**135.061.000,00**
1.02.05.02.01.01		1. Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat	Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat	Dinkes	100%	350.000.000,00	APBD	Baru	100%	135.061.000,00
1.02.05.2.02.05		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	Dinkes	100%	**65.000.000,00**	APBD	Baru	100%	**926.622.200,00**

1.02.05.2.02.01		1.	PenyelenggaraanPromosi Kesehatan danGerakan Hidup Bersihdan Sehat	PenyelenggaraanPromosi Kesehatan danGerakan Hidup Bersihdan Sehat	Dinkes	100%	65.000.000,00	APBD	Baru	100%	926.622.200,00
1.02.05.2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat DaerahKabupaten/Kota**					**90.302.152,00**				**1.420.833.506,00**
1.02.05.2.03.01		1.	Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM	Dinkes	100%	90.302.152,00	APBD	Baru	100%	1.420.833.506,00
TOTAL							***366.906.282.356,00***				***180.465.318.401,50***

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan. Adapun rencana kerja tahun 2026 dan kebutuhan anggaran tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KESEHATANKAB. KEDIRI

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	15	16	17
						Dinas Kesehatan			366.906.282.356,00		335.465.378.322,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			366.906.282.356,00		335.465.378.322,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			366.906.282.356,00		335.465.378.322,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	167.699.539.618,00	-	167.432.292.146,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	312.053.200,00	-	325.000.000,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	187.230.000,00		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	124.823.200,00		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	164.346.450.846,00	-	164.346.482.846,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	161.964.233.000,00		161.964.233.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.127.749.846,00		1.127.749.846,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.189.500.000,00		1.189.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	64.968.000,00		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	60.900.000,00	-	60.900.000,00	
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	60.900.000,00		60.900.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	444.206.800,00	-	445.797.400,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi						
							-	-	44.498.800,00		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.970.000,00		69.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	39.505.400,00		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	162.827.400,00		162.827.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.990.200,00		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	67.415.000,00		68.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.435.878.300,00	-	1.435.878.000,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00		2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	578.745.300,00		578.745.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							-	-	120.000.000,00		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							0	0 0	734.633.000,00		734.633.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.100.050.472,00	-	818.233.900,00	

	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	24.800.000,00		24.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							0	0 0	628.723.700,00		628.723.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel						
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	154.710.200,00		154.710.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	281.816.572,00		0,00	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	195.937.302.386,00	-	164.926.357.024,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.786.766.686,00	-	13.306.488.824,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas						

							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	37 Unit	12.600.420.000,00		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	37 Unit	1.355.318.262,00		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	1.450.000.000,00		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	69.999.700,00		119.999.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	486.489.124,00		486.489.124,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	287.406.600,00		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						

							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket	12.287.133.000,00		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	37 Paket	250.000.000,00		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	166.392.066.700,00	-	150.861.268.200,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	165.620.000,00		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	126.740.000,00		126.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	410 Orang	97.500.000,00		97.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						

							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	149.961.000,00		149.961.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	162.189.000,00		162.189.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4500 Orang	300.977.400,00		300.977.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4500 Orang	104.753.800,00		93.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	138.795.000,00		138.795.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	84.943.500,00		84.943.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	400 Orang	291.089.700,00		291.089.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	420 Orang	310.347.000,00		310.347.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	173.647.800,00		173.647.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	75.000.000,00		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	62.670.000,00		62.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	491.343.000,00		491.343.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	181.562.000,00		181.562.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	147.475.700,00		147.475.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	622.091.000,00		622.091.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	103.282.800,00		103.282.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	239.066.500,00		239.066.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	375.974.000,00		375.974.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	160.446.289.500,00		145.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	85.757.500,00		85.757.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	50.000.000,00		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	585.171.500,00		123.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	100.380.000,00		100.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	75.000.000,00		464.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						

							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	464.760.000,00		464.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	120 Orang	23.037.000,00		23.037.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	156.642.000,00		156.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	341.200.000,00	-	341.200.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	341.200.000,00		341.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	417.269.000,00	-	417.400.000,00	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	357.400.000,00		357.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	59.869.000,00		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	2.040.981.200,00	-	1.928.270.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	59.294.800,00	-	60.000.000,00	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	59.294.800,00		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	140.416.400,00	-	27.000.000,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	9.799.600,00		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	130.616.800,00		17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.841.270.000,00	-	1.841.270.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	1.841.270.000,00		1.841.270.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	723.157.000,00	-	723.157.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	193.403.000,00	-	193.403.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	193.403.000,00		193.403.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	115.930.800,00	-	115.930.800,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh						

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	115.930.800,00		115.930.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	85.000.000,00	-	85.000.000,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	85.000.000,00		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	55.000.000,00		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	273.823.200,00	-	273.823.200,00	

	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	273.823.200,00		273.823.200,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	505.302.152,00	-	455.302.152,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	350.000.000,00	-	350.000.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	350.000.000,00		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	65.000.000,00	-	65.000.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	65.000.000,00		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	90.302.152,00	-	40.302.152,00	

	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	90.302.152,00		40.302.152,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**366.906.282.356,00**		**335.465.378.322,00**	

BAB V
PENUTUP

Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026. Rancangan awal Renja Dinas Kesehatan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja merupakan hal yang penting dan sangat perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri. Keberhasilan dalam pelaksanaan program-program tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung juga dengan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat, supaya suatu rencana dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, keseluruhan program ini diharapkan dapat diaktualisasi sesuai visi, misi Kabupaten Kediri dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam hubungan yang dinamis dan sinergi.

Kediri, - 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. Ahmad Khotib., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197003242002121003

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA